

## PENGARUH SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DALAM PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Muhammad Hafiz<sup>1</sup>, Suryanto<sup>2</sup>, Muhammad Azmii Dalimunthe<sup>3</sup>, Deliana<sup>4</sup>, Ilham Hidayah Napitupulu<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Sistem Informasi Akuntansi, Akuntansi, Politeknik Negeri Medan, Medan

Email : [mhdhafizjack@gmail.com](mailto:mhdhafizjack@gmail.com), [suryanto@polmed.ac.id](mailto:suryanto@polmed.ac.id),  
[mhdazmiidalimunthe@gmail.com](mailto:mhdazmiidalimunthe@gmail.com), [Delianatar@gmail.com](mailto:Delianatar@gmail.com), [napit77@yahoo.com](mailto:napit77@yahoo.com)

### ABSTRACT

*An accounting information system is an information system that has an information processing process that produces financial reports. This research is causative. The data used in this study were from several previous studies. This study discusses an accounting information system that is able to assist the financial reporting process and an effective system in the financial reporting process.*

**Keywords:** Accounting information system and financial reporting

### PENDAHULUAN

Laporan keuangan merupakan cerminan performa keuangan suatu entitas dalam satu tahun anggaran. Sama halnya seperti sector private, pemerintah daerah juga memiliki laporan keuangan daerah (Nordawati, Deddi. 2006). fungsi pemerintahan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah sebagai pelayan public. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut mampu mengelola keuangan daerahnya secara baik dan profesional demi memenuhi target pemerintah yang bersih. Salah satunya adalah dengan membuat pengelolaan keuangan daerah yang baik. Dengan mengelola keuangan daerah yang baik, secara langsung dapat mengontrol penggunaan keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan dan tepat waktu serta akuntabel. Pemerintah daerah yang dimaksud adalah setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Setiap OPD wajib menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), maka dari itu pemerintah daerah wajib memberikan binaan dalam kerangka

Sistem Pengendalian Internal (SPI). Pembinaan dapat berupa menerapkan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) terhadap kepala OPD beserta entitas OPD. Pembinaan ini bertujuan untuk membimbing OPD agar mampu Menyusun laporan keuangan sesuai dengan yang diharapkan. Karena setiap OPD yang memberikan laporan keuangannya akan disatukan kemudian menjadi laporan keuangan bagi Pemerintah Daerah. Jika Pemerintah Daerah sudah menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel, tepat waktu, dan akurat serta dapat dimanfaatkan oleh pihak lain, maka Pemerintah Daerah tersebut sudah mencapai tujuan dalam Menyusun laporan keuangan (Tunggal, Amin Widjaja. 2010) (Rachmawati, Sella dkk. 2016).

### LANDASAN TEORI

Sistem Pengendalian Internal (SPI) Pengendalian Internal merupakan suatu kebijakan dan tata cara untuk melindungi asset perusahaan dari kesalahan dalam penggunaannya, memastikan bahwa

doi:

© 2021 Jurnal Mutiara Akuntansi. This is an open access article under the CC BY-SA license

Website: <http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA/>

<http://e-journal.sari-mutiara.ac.id>

informasi produksi organisasi yang disajikan akurat dan meyakinkan bahwa peraturan dan regulasi hukum telah diikuti (Feriyanto, O dan Encep Hadian. 2014). Dalam hal melaporkan laporan keuangan adalah ketepatan waktu (timeliness). Ketepatan waktu adalah Batasan waktu dalam mempublikasi laporan keuangan. Karena ketepatan waktu laporan keuangan untuk memberikan ruang waktu bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan tepat sebelum informasi tersebut kedarluarsa untuk mempengaruhi keputusan. Salah satu factor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan yaitu system pengendalian intern. SPI menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah proses integral atas Tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan yang berkualitas akan sangat dipengaruhi oleh system pengendalian internal yang dimiliki pemerintah daerah (Drama, 2014).

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah SIPKD merupakan aplikasi yang didesain Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dalam rangka percepatan transfer data dan efisiensi dalam penghimpunan data keuangan daerah. SIKPD ini terintegrasi dalam bidang pengelolaan keuangan daerah dalam membantu pemerintah daerah untuk meningkatkan efektifitas penerapan berbagai peraturan pengelolaan keuangan daerah. Aplikasi SIPKD ini berlandaskan

asas efisiensi, efektif, transparan, akuntabel dan auditable dan dipernakan dalam rangka penguatan persamaan persepsi system dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam penginterpretasian dan pengimplementasian berbagai peraturan perundang-undangan ([www.djkd.kemendagri.co.id](http://www.djkd.kemendagri.co.id)). Namun, SIPKD bisa tidak berfungsi secara maksimal. Hal ini terjadi karena tidak semua pengelola keuangan pada SKPD mampu menggunakannya. Misalnya adalah jumlah SDM yang terbatas yang mengetahui cara penggunaan SIPKD. Hal ini akan menyebabkan SKPD ketergantungan kepada SDM yang mampu menggunakan aplikasi SIKPD. (Sari, Diah Cipta, Roekhudin. 2016). Suatu system bisa jadi mengalami kegagalan fungsi Ketika sedang diimplementasikan, penyebab umumnya kegagalan jalannya suatu system adalah aspek teknis, seperti banyaknya syntax error, logical error, dan kesalahan informasi. Selain itu, penyebab lain atas gagal menjalankan system adalah aspek keperilakuan (behaviour). Hal ini umumnya terjadi dari SDM yang menolak atau tidak sanggup menjalankan SIPKD tersebut. (Jogiyanto, 2008: 1-2)

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau studi literatur. Studi literatur adalah penelitian yang mengumpulkan beberapa karya tulis ilmiah maupun penelitian yang bersifat kepustakaan atau telaah dalam memecahkan masalah yang bertumpu dalam penelaahan kritis dan mendalam terhadap Pustaka-pustaka yang terkait. Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil beberapa

doi:

© 2021 Jurnal Mutiara Akuntansi. This is an open access article under the CC BY-SA license

Website: <http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA/>

<http://e-journal.sari-mutiara.ac.id>

penelitian-penelitian terdahulu yang kemudian dijelaskan secara sistematis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sistem informasi akuntansi merupakan sistem informasi yang memiliki proses pengolahan informasi berupa data transaksi yang akan menghasilkan informasi berupa laporan keuangan. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi digunakan sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan. Penerapan sistem akuntansi pada suatu diharapkan dapat mendorong dan membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan pelaporan keuangan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan keandalan laporan keuangan itu sendiri

Sistem informasi akuntansi yang baik sangat dibutuhkan untuk mendorong proses pelaporan keuangan. Namun dalam penggunaan sistem akuntansi diperlukan sebuah pemahaman yang baik sehingga dalam proses pelaporan keuangan tidak terkendala (Bastian:2007). Jika sistem informasi akuntansi yang dimiliki lemah maka proses pelaporan keuangan tidak akan memiliki kualitas yang baik sebab laporan keuangan yang dihasilkan menjadi kurang relevan dalam proses pengambilan keputusan. Proses pelaporan keuangan di pemerintah daerah juga sangat bergantung dengan bagaimana sistem informasi akuntansi yang dimiliki oleh pemerintah daerah itu sendiri. Jika sistem informasi akuntansi yang dimiliki baik maka akan mampu membantu pemerintah daerah dalam proses pelaporan keuangan. Pada penelitian (Sari dkk:2016) ditemukan sistem yang kurang baik membuat individu merasa enggan untuk menggunakannya karena memiliki kekhawatiran terhadap

sistem yang akan mengolah data. Temuan ini semakin menguatkan bahwa jika suatu sistem informasi akuntansi yang lemah ataupun kurang baik justru akan mengganggu proses pelaporan keuangan itu sendiri.

Sistem informasi akuntansi yang baik diharapkan mampu mendorong proses pelaporan keuangan, akan tetapi dalam proses pelaporan keuangan juga diperlukan pemahaman untuk melakukan pelaporan keuangan. Sistem informasi akuntansi yang dimiliki suatu pemerintah daerah tidak mempengaruhi pelaporan keuangan sebab para pengguna masih kurang memahami penerapan sistem tersebut (Eristanti & Putra:2018). Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses pelaporan keuangan harus memiliki orang yang mampu menggunakan sistem itu sendiri sebab jika para pengguna memiliki pemahaman yang kurang baik maka sistem informasi akuntansi yang dibuat akan menjadi mubazir sebab sistem yang ada tidak mampu dijalankan oleh pemerintah daerah dalam proses pelaporan keuangan. Maka akan lebih baik jika proses pelaporan keuangan menggunakan sistem yang telah dibuat sehingga proses pelaporan keuangan pemerintah daerah menjadi lebih baik.

## **KESIMPULAN**

Sistem informasi akuntansi yang baik dibutuhkan dalam proses pelaporan keuangan. Sebab hanya dengan sistem informasi akuntansi yang baik mampu membantu proses pelaporan keuangan. Pada proses pelaporan keuangan juga dibutuhkan pemahaman atas sistem pelaporan keuangan itu sendiri agar proses pelaporan keuangan menjadi efektif dan efisien.

doi:

© 2021 Jurnal Mutiara Akuntansi. This is an open access article under the CC BY-SA license

Website:<http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA/>

<http://e-journal.sari-mutiara.ac.id>

## DAFTAR PUSTAKA

- Drama, Harken. 2014. *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Intervening.*(Studi empiris Pada SKPD Kota Solok). Jurnal Akuntansi, 2 (2), Universitas Negeri Padang.
- Feriyanto, O, Encep Hadian. 2014. *Sistem Informasi Akuntansi Pengeluaran Kas dan Pengendalian Intern Pengeluaran Kas: Studi Deskriptif Pada UKM di Kota Bandung.* STAR-Study & Accounting Research Vol XI, No.1-2014).
- Internal dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah.* Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis Vol. 8 No. 2, 206-213
- Jogiyanto, H.M. 2007. *Model Kesuksesan Sistem Teknologi Informasi.* Edisi I. Andi Offest, Yogyakarta.
- Nordiawan, Deddi. 2006. *Akuntansi Sektor Publik.* Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Rachmawati, Sella, Rini Rini, and Yessi Fitri. 2016. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia.* Akuntabilitas. Jurnal Akuntansi 9 (1): 143-60).
- Salmaa, 2021, “Studi Literatur: Pengertian, Ciri-Ciri, dan Teknik Pengumpulan Datanya”,  
<https://penerbitdeepublish.com/studi-literatur/>, 9 November 2021
- Sari, Diya Cipta, Roekhudin. 2016. *Determinan Penggunaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengaruhnya terhadap ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan SKPD.* Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen, Vol. 2, No. 1, halaman 17-30.
- Tunggal, Amin Widjaja. 2010. *Dasar-Dasar Audit Internal Pedoman Untuk Auditor Baru.* Jakarta:Harvaindo

doi:

© 2021 Jurnal Mutiara Akuntansi. This is an open access article under the CC BY-SA license

Website:<http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA/>

<http://e-journal.sari-mutiara.ac.id>